

Analisis Kesiapan Wilayah Calon Lokasi Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Damar Paramananda
damarparamananda@gmail.com
Luthfi Muta'ali
luthfimutaali@ugm.ac.id

Abstract

On August 26, 2019, President Joko Widodo selected part of Penajam Paser Utara Regency and part of Kutai Kartanegara Regency as a candidate location for the National Capital. This research aims to determine the regional readiness of the candidate location for the National Capital. This research uses a deductive confirmatory qualitative approach. The study of this research focuses on the perceptions of the regional government, some of the stakeholders involved, and some people in Penajam Paser Utara Regency and Kutai Kartanegara Regency about the regional readiness in these locations. The data collection methods include in-depth interviews, field observations, documentation, and literature study. Identification of general conditions and characteristics of the candidate location for the National Capital produces several aspects that measure regional readiness, including aspects of location, disaster, ecology, land, facilities and infrastructure, demography, socio-culture, policies, and defense and security. Based on the results of the analysis related to the aspects that are the measure of regional readiness, several variables were found that determine readiness in each aspect. Comprehensively, the candidate location for the National Capital in part of Penajam Paser Utara Regency and part of Kutai Kartanegara Regency is sufficiently supportive for the development of the National Capital.

Keywords: Readiness, Candidate Location, National Capital

Abstrak

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai calon lokasi Ibu Kota Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan bersifat deduktif konfirmatori. Kajian dari penelitian ini berfokus pada persepsi pemerintah daerah, beberapa *stakeholder* yang terlibat, serta beberapa masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan kesiapan wilayah di lokasi tersebut. Adapun metode pengumpulan data dengan *in-depth interview*, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Identifikasi kondisi umum dan karakteristik wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara menghasilkan sejumlah aspek yang menjadi ukuran kesiapan wilayah, di antaranya aspek lokasi, kebencanaan, ekologi, pertanahan, sarana prasarana, demografi, sosial budaya, kebijakan, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan hasil analisis terkait dengan aspek yang menjadi ukuran kesiapan wilayah, ditemukan beberapa variabel yang menentukan kesiapan dalam tiap-tiap aspek. Secara komprehensif, wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup mendukung untuk pembangunan Ibu Kota Negara.

Kata kunci: Kesiapan, Calon Lokasi, Ibu Kota Negara

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan gagasan yang sudah diwacanakan cukup lama, bahkan sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno. Pada saat itu juga Pulau Kalimantan telah dipandang sebagai wilayah ideal bagi penempatan lokasi Ibu Kota Negara yang baru untuk menggantikan Jakarta. Sayangnya hal ini tidak kunjung direalisasikan dan selalu menjadi wacana yang timbul-tenggelam setelah berakhirnya era orde lama.

Banyak masalah timbul jika memang Ibu Kota Negara masih tetap di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta dinilai semakin tidak optimal. Posisi Jakarta yang berada di Pulau Jawa secara tidak langsung mengakibatkan pembangunan yang cenderung Jawasentris dan letak geografis Jakarta yang berada di belahan barat wilayah Indonesia mengakibatkan ketimpangan pembangunan yang berat ke barat. Dalam bidang ekonomi, wilayah Indonesia Timur menjadi lebih tertinggal dibanding wilayah Indonesia bagian Barat. Ketertinggalan ini kemudian merembet ke semua indikator pembangunan. Posisi Jakarta yang tidak berada di tengah cakupan wilayah Indonesia menyebabkan pula kurangnya semangat kebangsaan dari penduduk yang letaknya sangat jauh dari pusat kekuasaan ini, seperti misalnya yang terjadi pada kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Usulan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan bukanlah ide reaktif yang semata-mata berangkat dari kemacetan dan kepadatan Kota Jakarta. Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya, hanyalah sisi kecil dari landasan usulan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah sangat penting, oleh karenanya harus dilihat sebagai penanda bahwa persoalan sebenarnya di Kota Jakarta sudah terlampaui berat karena tidak adanya

kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir. Dengan kata lain, usulan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan ini adalah usulan konkrit untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini mewarisi setumpuk masalah (Chaniago et. al, 2008).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (2019) menyebutkan bahwa ada 7 syarat dari pertimbangan dalam menentukan wilayah Ibu Kota Negara. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah Indonesia Timur.
2. Tersedia lahan yang luas milik pemerintah/BUMN perkebunan untuk mengurangi investasi.
3. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, erosi, serta kebakaran hutan.
4. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.
5. Dekat dengan kota eksisting yang telah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.
6. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal.
7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Setelah melewati proses kajian yang panjang, pemerintah akhirnya mengambil keputusan besar untuk memilih dan menetapkan wilayah calon Ibu Kota Negara. Dari berbagai wilayah yang menjadi spekulasi publik, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara akhirnya dipilih oleh pemerintah. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kajian yang berkesimpulan bahwa *region* yang dipilih

adalah wilayah yang paling potensial dan ideal menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara. (Sahamony, 2018).

Pemindahan lokasi Ibu Kota merupakan upaya relokasi atau menciptakan ruang dan wilayah baru sebagai lokasi berdirinya komponen-komponen pusat pemerintahan untuk menggantikan ruang dan wilayah sebelumnya. Kebijakan pemindahan Ibu Kota dari suatu wilayah ke wilayah lain menjadi keputusan yang besar, karena membutuhkan kesiapan institusi, masyarakat, dan dana yang cukup banyak (Aurumbita, 2015).

Berdasarkan berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada kesiapan wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sintesis dari observasi, studi dokumenter, dan wawancara dengan pemerintah daerah, beberapa *stakeholder* yang terlibat, serta beberapa masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesimpulan dari persepsi tersebut akan menggambarkan secara komprehensif kesiapan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibu Kota Negara pengganti Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deduktif konfirmatori. Penelitian ini berangkat dari teori/norma yang sudah mapan dan formal sebagai dasar pembuatan keputusan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni terdiri atas studi literatur, observasi, pengumpulan data instansional, dan wawancara.

Responden dalam penelitian ini adalah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditentukan melalui penentuan sampel dengan teknik *purposive*. *Purposive sampling*

berdasarkan pada kelompok yang direpresentasikan yaitu pemerintah daerah, beberapa *stakeholder*, dan beberapa masyarakat di calon lokasi Ibu Kota Negara tersebut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memerlukan metode pengolahan data berdasarkan perolehan data di lapangan yang kemudian direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

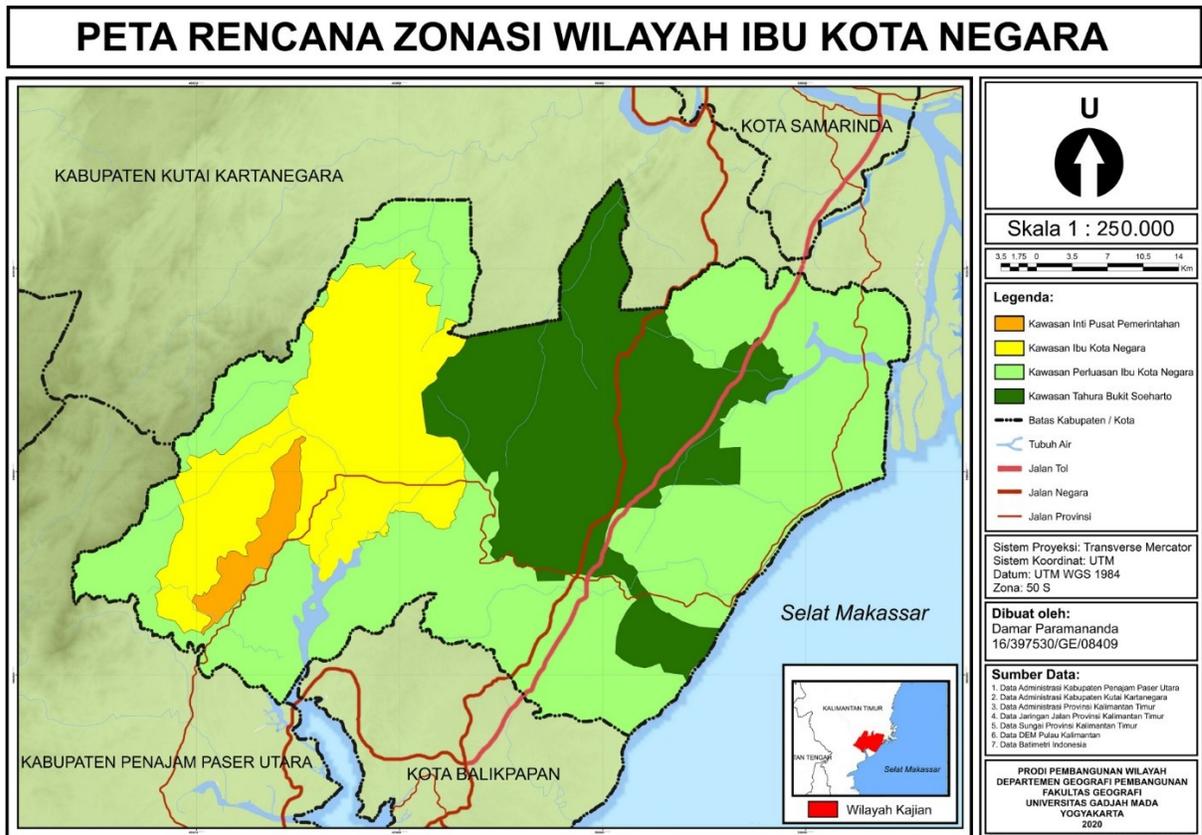
1. Identifikasi Kondisi dan Karakteristik Wilayah Calon Lokasi Ibu Kota Negara

Sebagai satu kesatuan wilayah, langkah pertama dalam menganalisis kesiapan adalah melakukan identifikasi terhadap kondisi umum dan karakteristik dari wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara itu sendiri. Identifikasi tersebut menghasilkan sejumlah aspek yang menjadi ukuran kesiapan wilayah, di antaranya aspek lokasi, kebencanaan, ekologi, pertanahan, sarana prasarana, demografi, sosial budaya, kebijakan, serta pertahanan dan keamanan.

a. Aspek Lokasi

Secara spesifik, lokasi Ibu Kota Negara yang baru terletak di sebagian 5 kecamatan dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kecamatan yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara, antara lain:

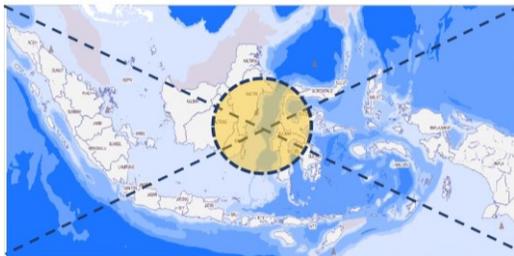
1. Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan Loa Janan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kecamatan Muara Jawa di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 1. Peta Adminstrasi Calon Lokasi IKN

Seluruh kawasan Tahura Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja juga dimasukkan dalam daerah administrasi Ibu Kota Negara yakni menjadi kawasan penyangga yangmana untuk menjamin kelestarian kawasan konservasi di wilayah Ibu Kota Negara.

Posisi wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara relatif lebih mendekati *center of gravity* dari segi geografis Indonesia melalui perhitungan silang garis hubung Sabang sampai Merauke dan garis hubung Pulau Miangas sampai Pulau Rote sehingga lokasi ini sangatlah strategis.



Gambar 2. Letak Calon Lokasi Ibu Kota Negara yang berada di tengah wilayah NKRI (Sumber: Bappenas, 2019)

Agar dapat melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, maka pemerintah menentukan lokasi Ibu Kota Negara berada dekat dengan kota eksisting yang telah berkembang. Maksudnya adalah kota yang sudah memiliki akses mobilitas atau logistik, seperti bandara atau pelabuhan. Adapun jarak lokasi Kawasan Inti Pemerintahan IKN menggunakan jalur eksisting ke Kota Balikpapan adalah 91 km. Sedangkan ke Kota Samarinda adalah 128 km. Apabila menggunakan garis lurus, jarak ke Kota Balikpapan 44 km dan ke Kota Samarinda adalah 56 km.

Kawasan Inti Pemerintahan IKN sendiri terdapat di Kecamatan Sepaku,

Kabupaten Penajam Paser Utara. Aksesibilitas yang ada saat ini masih kurang baik, karena jalan utama yang ada cenderung rusak dan berlubang sehingga jika menuju ke lokasi Kawasan Inti Pemerintahan IKN harus memakan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Bappenas, lahan yang dibutuhkan untuk lokasi Kawasan Ibu Kota Negara kurang lebih 180.000-256.000 ha. Di atas lahan ini akan dibangun sebuah kota baru yang ideal. Seluruh infrastruktur akan dibangun dari nol, tetapi lokasi ini berdekatan dengan dua kota besar yang telah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda serta dilengkapi dengan segala fasilitas pendukungnya, di antaranya Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kota Balikpapan untuk penerbangan skala internasional dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda untuk penerbangan skala nasional, serta Pelabuhan Semayang di Kota Balikpapan.



Gambar 3. Bandara SAMS Sepinggan dan Bandara APT Pranoto
(Foto: Paramananda, 2020)

Calon lokasi Ibu Kota Negara juga terletak di dekat Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Dengan adanya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tentunya akan mendorong perekonomian yang ada di sekitar Jalan Tol tersebut sehingga otomatis nantinya akan dibangun jalan-jalan penghubung lainnya yang juga mempermudah akses menuju Ibu Kota Negara, baik Kawasan Inti Pemerintahan, Kawasan Ibu Kota Negara, maupun Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.



Gambar 4. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
(Foto: Paramananda, 2020)

b. Aspek Kebencanaan

Calon lokasi Ibu Kota Negara relatif aman dari bencana alam, baik gempa bumi, tsunami, maupun erupsi gunung api. Wilayah tersebut cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (*megathrust*). Hal ini membuat kekuatan gempanya tidak sekuat besaran gempa di wilayah lain yang lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng. Meskipun di dekat Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi sebelumnya, tapi secara keseluruhan wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia yang memiliki sejarah gempa yang merusak dan menimbulkan korban jiwa maupun korban materi yang sangat banyak. Wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara sendiri juga aman dari bahaya erupsi gunung berapi karena Pulau Kalimantan tidak memiliki gunung berapi.

Dalam aspek kebencanaan, kemiringan lereng merupakan unsur penting yang dijadikan pertimbangan penentuan lokasi. Kesesuaian lahan bagi peruntukkan lahan terbangun tidak terlepas dari pertimbangan kemiringan lereng pada suatu wilayah. Ditinjau dari kondisi topografi, dapat diketahui bahwa wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara memiliki lahan yang cenderung berbukit dengan kemiringan yang relatif landai. Wilayah ini juga tidak dikelilingi oleh gunung berapi ataupun pegunungan yang tinggi. Ibu Kota Negara tidak selayaknya dibangun di atas wilayah dengan kontur tanah yang terlalu terjal. Sementara itu,

wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara memiliki kontur yang berbukit tetapi cenderung tidak terjal sehingga tergolong ideal untuk lokasi Ibu Kota Negara.

c. Aspek Ekologi

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan rumah bagi hutan tropis di Indonesia, di mana wilayah provinsi ini masih didominasi oleh kawasan hutan. Hal ini sangat mendukung untuk dibangunnya wilayah Ibu Kota Negara yang berbasis lingkungan.

Secara kuantitas, potensi sumber daya air yang ada di calon lokasi Ibu Kota Negara cukup mendukung. Akan tetapi secara kualitas, sumber daya air yang ada di calon lokasi Ibu Kota Negara kurang mendukung.

Sementara itu, di wilayah calon Ibu Kota Negara terdapat beberapa aktivitas pertambangan. Sedikitnya terdapat sekitar 20 titik lokasi sebaran tambang yang ada di wilayah tersebut. Bahkan banyak potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan yang eksploitatif. Meskipun terdapat ketentuan untuk reklamasi sesuai pertambangan digali, namun diperkirakan hanya beberapa perusahaan besar saja yang melakukan reklamasi. Banyak perusahaan-perusahaan kecil yang tidak melakukannya.



Gambar 5. Calon Lokasi Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kecamatan Sepaku (Foto: Paramananda, 2020)

d. Aspek Pertanahan

Aspek Pertanahan dilakukan dengan mengidentifikasi lahan yang secara

teoritis layak atau sesuai untuk menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara. Lahan yang dinyatakan sesuai untuk pembangunan harus merupakan lahan yang terbebas dari permasalahan sosial dan sesuai dengan regulasi. Penggunaan lahan yang ada di calon lokasi Ibu Kota Negara sangatlah bervariasi, tetapi masih didominasi oleh lahan milik pemerintah. Ketersediaan lahan yang ada pada wilayah tersebut dinilai cukup siap untuk dijadikan lokasi Ibu Kota Negara.

Penggunaan lahan di wilayah calon Ibu Kota Negara pada dasarnya mengikuti persebaran penduduk. Akumulasi penduduk sebagian besar terdapat pada lokasi-lokasi yang dikembangkan oleh pemerintah, seperti pusat perdagangan, pusat industri, dan lokasi transmigrasi. Wilayah yang ada pada umumnya telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Sementara peruntukkan lahan pada calon lokasi Kawasan Inti Pemerintahan Ibu Kota Negara didominasi oleh Kawasan Budidaya Kehutanan yang merupakan non-Area Penggunaan Lahan. Dengan demikian, tidak diperlukan pembebasan lahan pada wilayah tersebut, yang diperlukan hanyalah pelepasan dari *stakeholder* atau pemilih izin tersebut, seperti perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) pada wilayah tersebut.

Sedangkan untuk Kawasan Ibu Kota Negara dan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara sudah terdapat permukiman dan merupakan Area Penggunaan Lahan (APL). Lokasi calon lokasi Ibu Kota Negara merupakan wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang relatif masih rendah. Namun masyarakat mendukung dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara di wilayahnya dan

mereka tidak keberatan apabila harus permukimannya harus direlokasi.



Gambar 6. Wilayah Hukum Adat Paser di Kecamatan Sepaku
(Foto: Paramananda, 2020)

e. Sarana Prasarana

Aspek Sarana Prasarana terdiri atas ketersediaan fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas peribadatan.

Ketersediaan fasilitas kesehatan di wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara, saat ini sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada untuk saat ini. Di Kecamatan Sepaku sendiri terdapat Rumah Sakit Pratama yang merupakan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kabupaten. Setiap desa dan kelurahan yang ada juga memiliki Puskesmas Pembantu, begitupun di tingkat kecamatan juga tersedia Puskesmas. Hanya saja tenaga medis seperti dokter jumlahnya masih sangat minim dan peralatan medis yang ada juga cenderung minim.

Fasilitas Ekonomi yang ada di wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara cenderung masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas ekonomi seperti pasar yang ada saat ini dinilai masih kurang untuk memasok kebutuhan masyarakat yang ada. Masyarakat sana sendiri cenderung ke kota besar seperti Balikpapan untuk memenuhi kebutuhannya.



Gambar 7. Salah satu Pasar Tradisional di Kecamatan Sepaku
(Foto: Paramananda, 2020)

Jika ditinjau dari segi kuantitas, fasilitas pendidikan yang ada di calon lokasi Ibu Kota Negara untuk sementara ini sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Pelayanan dan fasilitas pendidikan di lima kecamatan yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara, tidak hanya terdiri oleh fasilitas pendidikan dari pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Namun untuk saat ini di wilayah calon Ibu Kota Negara sendiri belum ada satupun Perguruan Tinggi yang berdiri. Dalam hal ini masyarakat di sana harus merantau ke Kota Balikpapan, Kota Samarinda, atau Kecamatan Tenggarong selaku Ibu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi.

Dari segi kualitas, fasilitas pendidikan yang ada saat ini masih cukup memprihatinkan karena banyak bangunan yang rusak dan perlu diperbaiki karena sebagian besar bangunannya adalah bangunan tua yang dibangun pada tahun 1990 ke bawah. Saat ini, baru beberapa sekolah saja yang direnovasi, itu pun bertahap.

Fasilitas peribadatan yang ada di wilayah calon Ibu Kota Negara berupa Masjid, Langgar, Mushola, Gereja Katholik, dan Gereja Kristen. Sedangkan Pura dan Vihara tidak ada. Sebagian besar penduduk yang ada beragama Islam, hal ini juga bisa dilihat dari penyebaran atau jumlah fasilitas peribadatan Masjid, Langgar, dan Mushola. Ketersediaan fasilitas

peribadatan yang ada saat sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat yang ada saat ini.

Namun, berdasarkan observasi lapangan, kondisi beberapa tempat ibadah di sekitar calon lokasi Ibu Kota Negara dinilai tidak layak dan belum ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki bangunan-bangunan tersebut sehingga banyak masyarakat yang turun ke jalan meminta sumbangan kepada para pengendara yang melintasi jalan tersebut dengan tujuan untuk melakukan renovasi masjid atau langgar yang ada.

f. Aspek Demografi

Membangun Ibu Kota Negara tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungan saja, tetapi juga yang terpenting adalah penduduknya. Penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah karena penduduk sendiri ialah sumber daya manusia yang dapat menjadi potensi maupun masalah dalam perkembangan suatu wilayah. Salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan penyebaran penduduk, serta masalah kualitas penduduk sebagai pendukung pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ini perlu disiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah demografi.

Lapangan pekerjaan di sekitar calon lokasi Ibu Kota Negara masih tergolong sedikit sehingga banyak penduduk yang merantau ke wilayah kota terdekat, seperti Balikpapan dan Samarinda. Ketidaktersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi memperlihatkan adanya ketidakcocokan (*mismatch*)

antara pasar kerja dan pasokan tenaga kerja.

g. Aspek Sosial Budaya

Wilayah Provinsi Kalimantan merupakan miniatur Indonesia, di mana kemajemukan penduduk menjadi ciri khas demografis di wilayah ini sehingga menjadikan Provinsi Kalimantan Timur menjadi wilayah di mana penduduk dari berbagai latar belakang suku, agama, ras dan golongan hidup harmonis dan toleran. Akan tetapi, suku yang paling mendominasi di calon lokasi Ibu Kota Negara justru Suku Jawa. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kecamatan Sepaku merupakan salah satu wilayah dengan penduduk transmigrasi terbanyak di Kalimantan Timur sehingga beberapa pejabat daerah hingga perangkat desa yang ada didominasi oleh orang Jawa.

Heterogenitas penduduk yang ada di calon lokasi Ibu Kota Negara sangat tinggi. Terdapat berbagai suku yang ada di wilayah tersebut. Semua hidup rukun dan tidak pernah terjadi konflik antarsuku di calon lokasi Ibu Kota Negara. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah modal sosial, di mana jika pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur, maka wilayah tersebut akan menjadi kota yang plural dan membentuk karakteristik masyarakat yang majemuk karena penduduknya berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan.

h. Aspek Kebijakan

Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya akan merubah segala kebijakan daerah, seperti RTRW, RDTR, Zonasi Tata Ruang, dan sebagainya. Baik kebijakan tingkat provinsi maupun kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga

kebijakan yang ada tentunya akan disesuaikan dengan rencana pemindahan IKN dari Pemerintah Pusat. Adapun RTRW yang ada saat ini sudah harus banyak ditinjau kembali karena banyaknya penggunaan lahan eksisting saat ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya baik dalam rencana pola ruang maupun rencana struktur ruangnya.

Dalam rangka menyambut pemindahan Ibu Kota Negara, Pemerintah daerah untuk saat ini punya tanggung jawab untuk melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat serta koordinasi dan pembagian tupoksi supaya tidak tumpang tindih antara Pemerintah tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat.

i. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Lokasi Ibu Kota Negara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berada di pulau yang ditempati tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Berbeda dengan Jakarta, Ibu Kota baru berada satu daratan dengan negara tetangga. Oleh karena itu, harus diantisipasi ancaman keamanan dan pertahanan yang kemungkinan datang dari negara-negara tetangga dan ancaman lainnya adalah Ibu Kota Negara berhadapan dengan jalur laut internasional yang rawan akan konflik karena berhadapan dengan beberapa negara ASEAN yang terdekat adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Secara eksisting, perimeter pertahanan Ibu Kota Negara sudah cukup memadai. Lokasi calon Ibu Kota Negara dekat dengan Kodam VI/Mulawarman yang terletak di Kota Balikpapan. Lokasi calon Ibu Kota Negara juga dekat dengan

Pangkalan TNI AD di Kota Balikpapan, TNI AL Balikpapan atau Lanal Balikpapan. Selain itu, Lokasi calon Ibu Kota Negara juga dekat Pangkalan TNI AU Dhomber di Kota Balikpapan.



Gambar 8. Kodam VI/Mulawarman
(Foto: Paramananda, 2020)

Sedangkan dari segi perimeter keamanan, lokasi calon Ibu Kota Negara juga dekat dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur yang terletak di Kota Balikpapan. Pada umumnya, Polda berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Seperti halnya Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim ini juga berkedudukan di Kota Balikpapan, bukan di Ibu Kota Provinsi.



Gambar 9. Polda Kaltim
(Foto: Paramananda, 2020)

2. Sintesis Kesiapan Wilayah

Terdapat beberapa hal yang luput dari pengamatan baik responden pada penelitian ini maupun pemerintah pusat itu sendiri sehingga pada bagian ini dilakukan sintesis untuk menghasilkan ukuran kesiapan yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan analisis terkait dengan kesembilan aspek yang menjadi ukuran kesiapan wilayah, ditemukan beberapa variabel yang menentukan kesiapan dalam tiap-tiap aspek. Variabel yang menentukan kesiapan pada kesembilan

aspek tersebut merupakan hasil sintesis dari data yang didapatkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi pustaka atau membandingkan data dengan sumber-sumber tertulis yang didukung dengan dokumentasi.

Tabel 1. Ukuran Kesiapan Wilayah Calon Lokasi Ibu Kota Negara

No	Aspek	Variabel
1	Lokasi	Letak Geografis Luas Wilayah Kedekatan dengan kota yang sudah berkembang Aksesibilitas Infrastruktur Pendukung
2	Kebencanaan	Kerawanan Bencana Kemiringan Lereng
3	Ekologi	Potensi sumber daya alam Ketersediaan Air Kualitas Air
4	Pertanahan	Tingkat Pencemaran Lingkungan Penggunaan Lahan Ketersediaan Lahan Status Lahan Spekulasi
5	Sarana Prasarana	Dukungan Masyarakat Fasilitas Kesehatan Fasilitas Ekonomi Fasilitas Pendidikan Fasilitas Peribadatan
6	Demografi	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Kualitas Sumber Daya Manusia
7	Sosial Budaya	Kearifan Lokal Heterogenitas Penduduk Potensi Konflik Sosial
8	Kebijakan	Peraturan Daerah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
9	Pertahanan dan Keamanan	Kondisi Teritorial Pertahanan dan Keamanan Eksisting

a. Aspek Lokasi

Hasil sintesis terkait aspek lokasi pada wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa penetapan calon lokasi Ibu Kota Negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sudah tepat karena posisinya berada di tengah-tengah Indonesia sehingga lokasi ini sangatlah

strategis untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Aksesibilitas pada calon lokasi Ibu Kota Negara memuat ketersediaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara dan jaringan jalan yang menghubungkan antarwilayah. Semakin baik aksesibilitas yang tersedia pada lokasi baru yang akan direncanakan, maka akan menunjang interaksi wilayah, baik intra maupun inter-regional. Hal ini juga dapat menghemat biaya pembangunan infrastruktur transportasi.

Lokasi calon Ibu Kota Negara juga berada di antara dua kota yang telah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Keberadaan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda tentunya juga menjadi pertimbangan pemilihan lokasi Ibu Kota Negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara karena kedua kota penyangga ini merupakan kota yang sudah berkembang sehingga infrastruktur yang ada tentunya mempengaruhi kesiapan wilayah di calon lokasi Ibu Kota Negara. Secara praktis, Kota Balikpapan merupakan kota penyangga yang paling dekat dengan lokasi Ibu Kota Negara yang mana menjadi ‘Pintu Gerbang’ menuju Ibu Kota Negara dan menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan/rapat untuk penyiapan Ibu Kota Negara. Pembangunan Ibu Kota Negara sendiri rencananya akan dimulai dari Kota Balikpapan.

b. Aspek Kebencanaan

Berdasarkan hasil triangulasi data menunjukkan bahwa calon lokasi Ibu Kota Negara merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana alam, baik gempa bumi, tsunami, maupun erupsi gunung api. Potensi kebakaran hutan dan lahan di calon lokasi Ibu Kota Negara sangatlah rendah karena jenis tanah di

Provinsi Kalimantan Timur sendiri bukan tanah gambut seperti dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu potensi banjir di calon lokasi Ibu Kota Negara dirasa cukup minim karena wilayah serapan air dan sungai masih cukup banyak. Dengan penataan ruang yang konstruktif, persoalan banjir sebenarnya dapat diatasi.

Perencanaan pembangunan wilayah di lokasi yang baru harus mempertimbangkan kriteria kemiringan lereng. Hal ini dikarenakan kemiringan lereng suatu wilayah akan menentukan pola penggunaan lahan, bentuk kota, dan intensitas pembangunan. Calon lokasi Ibu Kota Negara terletak pada lahan perbukitan yang landai hingga datar sehingga tidak rawan tanah longsor dan lebih efisien secara biaya.

Pada tahap sintesis kesiapan calon lokasi Ibu Kota Negara telah dilakukan analisis terhadap kerawanan bencana alam secara kualitatif. Namun, analisis tersebut dilakukan pada fenomena bencana alam skala makro yang meliputi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor. Secara komprehensif calon lokasi Ibu Kota Negara relatif aman dari bencana alam. Hanya saja diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan DAS untuk mencegah terjadinya banjir.

c. Aspek Ekologi

Aspek ekologi dalam analisis kesiapan wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki daya dukung lingkungan hidup yang cukup baik untuk dijadikan lokasi Ibu Kota Negara. Secara umum lokasi tersebut memiliki akses terhadap air yang baik, hanya saja kualitas sumber daya airnya kurang baik. Dari sisi ketersediaan, ada tiga sumber cadangan air yang bisa digunakan sebagai

air baku, yaitu air hujan, air tanah, dan air permukaan (mata air, embung, dan bendungan). Ketiganya memberikan gambaran besarnya potensi dan ancaman keberlanjutannya.

Perlindungan dan pelestarian kawasan hutan merupakan bagian integral dari perencanaan tata ruang yang tengah dikaji secara serius oleh pemerintah. Meskipun wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara aman dari bencana gempa bumi dan gunung berapi, tetapi potensi bencana ekologis sudah cukup mengkhawatirkan akibat kerusakan hutan yang semakin luas dan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan dalam skala besar.

Pemindahan Ibu Kota Negara yang diiringi oleh pembangunan suatu kota yang baru sebagai fungsi Ibu Kota Negara merupakan peluang membangun konsep *Forest City*. Berdasarkan konsep tersebut tentunya pembangunan Ibu Kota Negara yang dilakukan akan sangat memperhatikan pembangunan dalam aspek lingkungan. Lahan bekas perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara yang ada di sekitar calon lokasi Ibu Kota Negara nantinya akan direncanakan menjadi lahan hijau seperti keadaan sebelumnya.

d. Aspek Pertanahan

Penggunaan lahan di calon lokasi Ibu Kota Negara didominasi oleh hutan dan lahan perkebunan, yakni perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga digunakan oleh pertanian ladang berpindah. Ketersediaan dan status lahan yang ada di calon lokasi Ibu Kota Negara cukup mendukung karena sebagian besar lahannya merupakan lahan milik pemerintah. Namun, ada beberapa lahan yang perlu dibebaskan karena sudah terbit sertifikat hak atas tanah.

Aspek pertanahan dalam analisis kesiapan wilayah di calon lokasi Ibu Kota

Negara menunjukkan bahwa lahan untuk calon lokasi Ibu Kota Negara sudah ditentukan, akan tetapi masih cenderung belum siap karena masih terdapat sejumlah permasalahan. Namun masyarakat di wilayah tersebut tidak keberatan jika harus direlokasi, masyarakat cenderung mendukung adanya pembangunan Ibu Kota Negara.

e. Aspek Sarana Prasarana

Kondisi dan tantangan pelayanan dasar masyarakat di calon lokasi Ibu Kota Negara penting untuk diketahui agar upaya peningkatan kualitas manusia dapat dilakukan secara komprehensif. Sarana prasarana yang ada di wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara maupun yang ada di sekitarnya sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Akan tetapi, dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara nantinya pemerintah perlu membangun dan mengembangkan lagi sarana prasarana di wilayah tersebut. Selain itu, diperlukan renovasi dan restorasi beberapa fasilitas yang ada saat ini seperti puskesmas, pasar, sekolah, tempat ibadah, dsb. karena kondisinya cenderung tidak layak untuk digunakan.

f. Aspek Demografi

Dari segi kualitas penduduk, pemindahan Ibu Kota Negara dikhawatirkan akan meminggirkan masyarakat lokal. Masyarakat lokal dapat terpinggirkan dengan adanya kedatangan para migran dari Pulau Jawa jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal ini.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula jumlah penduduk dan jumlah struktur yang dibutuhkan masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Sementara itu, proses segregasi dan diferensiasi terus berjalan sehingga hukumnya yang kuat akan selalu mengalahkan yang lemah.

Siap tidak siap, masyarakat yang ada di calon lokasi Ibu Kota Negara harus dapat bersaing dengan para migran dari luar daerah nantinya. Pemerintah Daerah tentunya harus melakukan komunikasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar dampak negatif dari pemindahan Ibu Kota Negara ini tidak semakin berkembang dan menghambat upaya pemerataan pembangunan nasional.

Pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan Timur dan sekitarnya. Implikasi perpindahan dalam hal kependudukan seperti infrastruktur, permukiman, ketenagakerjaan, kebutuhan pangan, dinamika sosial, dan etnisitas tentu akan memberikan dampak bukan hanya bagi pendatang, tetapi juga penduduk setempat. Potensi penduduk pendatang kelas menengah atas yang bersinggungan dengan kapasitas masyarakat perdesaan di sekitar Ibu Kota Negara menjadi salah satu contoh potensi masalah yang tidak boleh diabaikan, juga migrasi spontan yang akan terjadi.

g. Aspek Sosial Budaya

Dinamika sosial dan kebudayaan diperkirakan menjadi intensi pokok dalam rencana pemindahan wilayah Ibu Kota Negara ini, di mana banyak pengamat dan kelompok masyarakat di Kalimantan Timur yang memandang bahwa akan terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, pola kehidupan serta pola interaksi sosial di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

Seiring perkembangan zaman, ada banyak dari nilai-nilai sosial serta struktur masyarakat yang juga ikut berubah. Hal ini tentu akan terjadi juga pada masyarakat setelah terwujudnya wacana pemindahan Ibu Kota Negara di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis, perubahan sosial yang terjadi

akan sangat besar, dan mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat yang akan berdampak pula pada aspek sosial budaya. Masyarakat akan mampu untuk beradaptasi dengan berbagai dinamika tersebut, akan tetapi dalam prosesnya juga perlu dipertimbangkan potensi kejutan budaya maupun konflik di masyarakat terutama konflik sosial dan agrarian.

h. Aspek Kebijakan

Berdasarkan sintesis Aspek Kebijakan dalam analisis kesiapan wilayah di calon lokasi Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa kebijakan yang ada tengah disusun dan kebijakan Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan Ibu Kota Negara yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Komitmen jangka panjang sangat diperlukan agar pembangunan bisa dilanjutkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lintas periode. Kesiambungan adalah kunci bagi keberhasilan suatu rencana pembangunan jangka panjang.

i. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Dalam konteks Ibu Kota Negara, yang menjadi pertimbangan adalah letak geografisnya di Pulau Kalimantan yang dihuni tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam). Kondisi topografi yang berbukit-bukit, panjang perbatasan darat lebih dari dua ribu kilometer, perbatasan laut, jalur lintas internasional ALKI 2, cakupan

pengendalian pusat lalu lintas udara (*Flight Information Region*), minimnya instalasi pendukung seperti lapangan udara dan pangkalan laut, serta kekuatan militer negara-negara tetangga. Seperti dari beberapa data yang menyatakan bahwa di lokasi Ibu Kota Negara akan dibangun Mabes TNI, maka hal ini akan menimbulkan *Dilemmatic Security* bagi negara tetangga. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan dapat menimbulkan kekhawatiran pertahanan dan keamanan bagi negara tetangga, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura. Kekhawatiran ini muncul karena pemindahan Ibu Kota Indonesia juga diikuti oleh pemindahan besar-besaran kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang selama ini terpusat di Pulau Jawa, untuk kebutuhan pertahanan Ibu Kota Negara yang baru. Atau dengan kata lain, kekuatan TNI akan semakin mendekat ke Malaysia dan Brunei Darussalam.

Calon lokasi Ibu Kota Negara memiliki akses terhadap matra darat, laut, dan udara serta ditunjang dengan keberadaan pangkalan TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kodam VI/Mulawarman, dan Polda Kaltim di Kota Balikpapan. Aspek pertahanan dan keamanan dalam analisis kesiapan wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa secara umum wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini cukup mendukung untuk dibangunnya Ibu Kota Negara.

3. Strategi Pengembangan Wilayah

Dalam upaya pengembangan suatu wilayah menjadi lokasi Ibu Kota Negara, diperlukan arahan pengembangan untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut terkait dengan kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara. Strategi pengembangan wilayah yang dirumuskan

merupakan strategi yang bersifat *general* pada skala makro (kabupaten) sehingga secara umum tidak menyentuh aspek yang begitu teknis. Strategi pengembangan wilayah sebagai Ibu Kota Negara disusun berdasarkan permasalahan yang ada di calon lokasi dengan metode yang bersifat kualitatif.

a. Aspek Lokasi

Keterbatasan infrastruktur jalan, dermaga, dan jaringan telekomunikasi menjadi permasalahan mendasar pada calon lokasi Ibu Kota Negara sehingga diperlukan pengembangan komponen tersebut yang memadai untuk mendukung mobilitas dan konektivitas antarwilayah. Kondisi jalan utama yang ada cenderung rusak dan berlubang sehingga diperlukan upaya yang serius dari pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang tersebut.

Konektivitas antarwilayah yang ada masih cenderung rendah dan jalur perhubungan antarwilayah masih terbatas. Dalam hal ini perlu ditingkatkan jalur-jalur perhubungan yang ada sehingga dapat menjamin kelancaran arus barang dan jasa. Sarana pendukung antarwilayah juga masih tergolong minim, harapannya pemerintah dapat meningkatkan lagi penyediaan sarana pendukung antarwilayah.

Wilayah Ibu Kota Negara dekat dengan dua bandara besar, yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kota Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda, kedua bandara ini banyak memiliki rute yang sama sehingga diperlukan pengaturan fungsi Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kota Balikpapan untuk penerbangan skala internasional dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda untuk penerbangan skala nasional agar tidak

terjadi tumpang tindih fungsinya. Kedua bandara ini dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai bandara jamak atau *multiple airport system* untuk mendukung Ibu Kota Negara. Selain itu, kapasitas terminal kedua bandara tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bandara Ibu Kota Negara sehingga diperlukan pula peningkatan kapasitas kedua bandara tersebut sesuai proyeksi dalam jangka panjang. Pada jalur dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju pintu gerbang Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sering terjadi kemacetan yang cukup parah sehingga hal ini dapat menghambat mobilitas menuju wilayah Ibu Kota Negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan untuk membangun Jalan Tol yang menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju gerbang tol Manggar.

b. Aspek Kebencanaan

Kajian mengenai kerawanan bencana di Pulau Kalimantan sejatinya masih minim, padahal terdapat sesar gempa di wilayah Berau dan Tarakan. Diharapkan pemerintah dapat melibatkan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara masif untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi, dan mengurangi dampak bencana. Sejauh ini, belum pernah diadakannya sosialisasi bahaya bencana alam di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara, pemerintah tentunya harus mengadakan sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitian terkait dengan kebencanaan di calon lokasi Ibu Kota Negara.

Di calon lokasi Ibu Kota Negara tidak terdapat rute evakuasi bencana alam apapun. Hal ini tentunya bisa menjadi masukan untuk pemerintah agar membuat rute evakuasi bagi penduduk dengan mensimulasikan berbagai

skenario untuk mengukur tindakan pencegahan terbaik guna mengurangi dampak dari bencana. Selain itu, jumlah *EWS* masih sangat sedikit di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga pemerintah perlu mendistribusikan *EWS* (*Early Warning System*) yang terpadu dan terintegrasi di sejumlah titik yang berpotensi dapat mengalami bencana maupun yang terdampak bencana.

Secara historis, Provinsi Kalimantan Timur pernah mengalami beberapa kali gempa. Akan tetapi, hal ini masih luput dari pengamatan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat sehingga diperlukan pemanfaatan data dan dokumentasi historis untuk studi dan implementasi berdasarkan pembelajaran di masa lalu.

Dikarenakan belum pernah terjadi bencana alam yang cukup besar di calon lokasi Ibu Kota Negara sehingga belum pula terkoordinasinya rencana mitigasi bencana. Dalam hal ini pemerintah perlu merancang rencana mitigasi bencana terkoordinasi yang secara efisien secara waktu dan sumber daya. Untuk mewujudkan masyarakat Ibu Kota Negara yang tangguh bencana, pemerintah disarankan untuk mengadakan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan.

c. Aspek Ekologi

Banyak sumber air di wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara yang belum dikelola sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya air dan juga membangun waduk untuk menjaga *supply* air baku Ibu Kota Negara. Ada banyak pula potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan yang eksploitatif. Untuk itu, pembangunan Ibu Kota Negara haruslah memelihara potensi sumber

daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem

Pada wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara terdapat banyak ekosistem ruang hijau (hutan, kebun, area wisata alam, sungai, danau, dan sebagainya) yang belum terjamah sehingga pembangunan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekosistem ruang hijau (hutan, kebun, area wisata alam, sungai, danau, dan sebagainya) agar harmonis dengan aktivitas masyarakat Ibu Kota Negara.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pada wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara masih terdapat banyak terdapat lubang tambang yang belum diperbaiki dan pelibatan masyarakat lokal dalam reklamasi dan revegetasi dinilai masih sangat minim. Harapannya pemerintah bersama masyarakat dapat mengidentifikasi sebaran lubang tambang tersebut dan memberdayakan masyarakat lokal dalam reklamasi dan revegetasi.

Berdasarkan pengamatan di sepanjang jalan menuju calon lokasi Kawasan Inti Pemerintahan Ibu Kota Negara, terdapat banyak kawasan lindung yang terdegradasi. Diperlukan upaya serius untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan terutama pada kawasan lindung yang terdegradasi. Kawasan hutan konservasi yang menjadi habitat mamalia besar seperti orang utan, bekantan, beruang madu, dugong, dsb. juga masih belum dikelola secara optimal sehingga pemerintah perlu melakukan restorasi kawasan hutan konservasi yang menjadi habitat mamalia besar tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan budidaya yang mengganggu kawasan lindung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan lindung.

Pertambangan batu bara yang ada saat ini dinilai belum ramah lingkungan. Seiring dengan proses pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan pemerintah bersama *stakeholder* yang terlibat menerapkan penanganan dampak lingkungan dan pemilihan teknologi yang *pro-green* bagi sektor batu bara.

d. Aspek Pertanahan

Pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan akan menjadi momentum penyelesaian masalah-masalah yang mengemuka selama ini. Masalah pertanahan seperti tumpang tindih kepemilikan dan batas guna lahan sejatinya berakar dari permasalahan pembangunan yang telah berlarut-larut dan tidak pernah diselesaikan secara baik dan komprehensif. Masih minimnya upaya pemetaan kawasan yang rumit merupakan salah satu faktor penghambat pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam hal ini diperlukan upaya serius untuk melakukan pemetaan lahan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimulai dari kawasan yang paling rumit seperti Tahura dan lahan masyarakat adat, termasuk di daerah terpencil dan pedalaman. Pada calon lokasi Ibu Kota Negara masih terdapat beberapa permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah dan tata guna lahan sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah dan tata guna lahan. Sejauh ini juga belum ada mediasi antarpihak yang bersengketa sehingga diharapkan segera dilakukan mediasi apabila memang benar-benar masih terdapat pihak yang bersengketa.

Masih belum jelasnya landasan hukum kepemilikan tanah juga menjadi permasalahan yang cukup ironis. Dalam hal ini pemerintah harus memperjelas landasan hukum kepemilikan lahan dengan memperhatikan hak-hak adat

masyarakat. Titik lemah selanjutnya adalah belum adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dan belum ada peraturan perundang-undangan dalam hal ini sehingga harus dibangun terlebih dahulu sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat agar dapat ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan disertai dengan deliniasi tanah adat. Selain itu, masih terdapat beberapa batas wilayah antardesa yang belum definitif. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan penegasan batas wilayah antardesa yang belum definitif dan penetapannya sebelum pembangunan Ibu Kota Negara dimulai

Beberapa responden mengatakan bahwa mulai terpantau ada beberapa spekulasi tanah di sejumlah wilayah di Kecamatan Samboja. Untuk itu, pemerintah harus dengan sigap menerapkan kebijakan *land freezing* selama proses penyelesaian berlangsung untuk mengendalikan transaksi tanah. Kebijakan ini perlu diterapkan secara berkeadilan dan terbuka agar tidak dimanfaatkan oleh sekelompok oknum.

Belum tertatanya permukiman masyarakat, pusat-pusat kecamatan, dan ruang *peri-urban*/desa-kota juga menjadi permasalahan yang mempengaruhi kesiapan wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara sehingga perlunya pemerintah untuk menata permukiman masyarakat, pusat-pusat kecamatan, dan ruang *peri-urban*/desa-kota yang saling terhubung secara efisien agar nantinya dapat terwujudnya hubungan desa-kota yang sinergis atau *rural-urban linkage*. Diharapkan ada mekanisme relokasi permukiman dan lahan usaha

yang berkeadilan. Solusinya yakni dengan melengkapi *masterplan* dengan kebijakan relokasi permukiman dan lahan usaha yang berkeadilan (*land swap, land transfer, land consolidation*, dan sebagainya).

e. Aspek Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat ketersediaan data yang ada, wilayah yang masuk dalam calon lokasi Ibu Kota Negara masih belum dilakukannya identifikasi status kesehatan, gizi masyarakat, dsb. sehingga diperlukan untuk memetakan status kesehatan, gizi masyarakat, epidemiologi penyakit yang berpotensi muncul, serta identifikasi kebutuhan penyediaan pelayanan kesehatan (*supply side*) dan dukungan perilaku hidup sehat

Permasalahan selanjutnya yakni, masih rendahnya kualitas fasilitas kesehatan dasar dan minimnya tenaga kesehatan. Dalam hal ini diperlukan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas didukung oleh pemenuhan tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan serta pembiayaannya. Selain itu, belum terdapat sistem layanan kesehatan masyarakat yang terpadu pada calon lokasi Ibu Kota Negara sehingga pemerintah diharapkan membuat sistem layanan kesehatan masyarakat terpadu, serta layanan kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pasar tradisional yang ada saat ini masih kurang, padahal banyak lokasi strategis yang berpotensi untuk dibangun pusat perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah perlu membangun pasar-pasar tradisional pada lokasi-lokasi yang strategis. Selain itu, kapasitas pasar tradisional yang ada saat ini perlu ditambah sehingga perlu dilakukannya pengembangan kapasitas pasar-pasar tradisional yang ada saat ini.

Sebaran fasilitas pendidikan yang ada di calon lokasi Ibu Kota Negara saat ini belum terpetakan sehingga perlu adanya upaya untuk memetakan sebaran fasilitas pendidikan yang ada saat ini. Selain itu, masih ada beberapa masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan. Diharapkan pemerintah dapat memastikan akses pendidikan yang berkualitas untuk seluruh warga di wilayah Ibu Kota Negara.

Belum adanya perguruan tinggi di wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara mengisyaratkan pemerintah untuk membangun universitas bertaraf internasional guna meningkatkan pendidikan sumber daya manusia yang berdaya saing di wilayah Indonesia bagian timur khususnya. Diperlukan pula pusat-pusat riset, inovasi, dan pengembangan teknologi digital yang inklusif.

Secara eksisting, banyak bangunan sekolah yang perlu direnovasi. Tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjamin kualitas fasilitas pendidikan yang ada di wilayah Ibu Kota Negara.

Fasilitas peribadatan yang ada saat ini dinilai kurang untuk mencukupi kebutuhan fasilitas peribadatan Ibu Kota Negara sehingga dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara perlu dibangunnya fasilitas peribadatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Ibu Kota Negara. Heterogenitas masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur cenderung tinggi dan akan semakin tinggi dengan datangnya para migran dari luar daerah seiring dengan proses pemindahan Ibu Kota Negara. Untuk itu, diperlukan untuk membangun pusat tempat ibadah tiap-tiap agama dalam satu kawasan yang mencerminkan nilai-nilai pluralisme. Sementara itu, banyak tempat ibadah yang kondisinya memprihatinkan sehingga diperlukan pemugaran dan

rehabilitasi bangunan-bangunan tempat ibadah yang telah ada sebelumnya.

f. Aspek Demografi

Salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan. Aspek demografi mencakup antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, serta kualitas penduduk sebagai pendukung pembangunan. Pada wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara belum terpetakan penyerapan tenaga pada sektor yang sudah ada sehingga diperlukan langkah konkrit untuk memetakan penyerapan tenaga pada sektor yang sudah ada (pertanian, batu bara, pariwisata, dan konstruksi) dan sektor yang berpotensi dikembangkan (*renewable energy*, IT, pendidikan tinggi, farmasi, oleokimia, dan logistik kemaritiman). Pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang ada juga belum terpetakan sehingga perlu untuk dilakukan pemetaan pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di wilayah Ibu Kota Negara, serta jenis BLK dan kapasitas yang tersedia.

Selain itu, belum adanya program dan pelatihan untuk masyarakat yang ada mengisyaratkan pemerintah untuk mengembangkan berbagai program dan jenis pelatihan, dan menyediakan kuota bagi masyarakat asli/lokal. Diperlukan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada sehingga perlunya pengembangan pelatihan kerja sesuai dengan peta kebutuhan kerja.

Masyarakat lokal dapat terpinggirkan dengan adanya kedatangan para migran dari Pulau Jawa. Perlu upaya serius seperti memberikan kuota dan fasilitasi bagi masyarakat lokal yang telah terdidik/terlatih untuk menjadi ASN atau terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara.

g. Aspek Sosial Budaya

Di wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara masih terdapat banyak tempat-tempat keramat masyarakat adat yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Sebelum dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara sebaiknya pemerintah bersama para tokoh adat atau komunitas lokal mengidentifikasi dan melakukan pemetaan digital tempat-tempat keramat dan penting masyarakat adat. Tradisi dan kearifan lokal yang ada harus dilestarikan agar tidak tergerus oleh arus migrasi sehingga diperlukan pelibatan tokoh masyarakat, adat, dan kesultanan di wilayah Ibu Kota Negara dalam penggalian tradisi, tari-tarian, cerita lisan, dan unsur budaya lainnya. Selain itu, diperlukan forum dan strategi komunikasi yang melibatkan masyarakat lokal. Oleh karenanya, pemerintah disarankan untuk membangun forum dan strategi komunikasi, serta mengidentifikasi tokoh masyarakat untuk mempromosikan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional yang direpresentasikan dalam pembangunan Ibu Kota Negara.

Di beberapa wilayah masih ada klaster permukiman yang homogen berdasarkan suku, umumnya pada wilayah transmigran. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan tidak terjadi klaster-klaster permukiman yang eksklusif menurut ras, suku, agama, atau golongan lainnya yang dapat menghambat pembentukan kohesi sosial. Belum pernah terselenggaranya dialog antarpemuka agama atau tokoh masyarakat mensyaratkan pemerintah untuk melakukan dialog antarpemuka agama dan tokoh masyarakat. Dibutuhkan pula keterlibatan ormas keagamaan dan masyarakat dalam memberi rekomendasi kebijakan sehingga keterlibatan tersebut dapat

menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah.

h. Aspek Kebijakan

Peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sinkron dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara sehingga pemerintah perlu menyelaraskan peraturan perundang-undangan. Dibutuhkan pula RTRW yang menunjang upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain RTRW yang nanti akan khusus mengatur IKN, RTRW Pulau Kalimantan, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten perlu disempurnakan untuk menunjang upaya menjaga kelangsungan paru-paru dunia dan mengendalikan ekspansi fisik yang berpotensi menyebabkan deforestasi. Diperlukannya pula identifikasi dampak dari RTRW terhadap lingkungan hidup. Untuk itu harus dilakukan identifikasi pengaruh atau konsekuensi dari Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Struktur dan pola ruang yang ada saat ini perlu direvisi sehingga pemerintah perlu menciptakan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat akomodatif terhadap pengaruh perubahan wilayah administratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi antara tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi sehingga pemerintah haruslah memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi.

i. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pangkalan militer untuk Ibu Kota Negara dinilai masih kurang sehingga diperlukan untuk membangun pangkalan militer modern yang terintegrasi untuk

semua kekuatan baik darat, laut, maupun udara. Selain itu, juga diperlukan dibangunnya Mabes TNI dan Mabes Polri untuk Ibu Kota Negara.

Kompetensi SDM TNI dan Polri di wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara dan sekitarnya masih terbatas. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM TNI dan Polri yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen di Ibu Kota Negara

KESIMPULAN

1. Identifikasi kondisi umum dan karakteristik wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara menghasilkan sejumlah aspek yang menjadi ukuran kesiapan wilayah, di antaranya aspek lokasi, kebencanaan, ekologi, pertanahan, sarana prasarana, demografi, sosial budaya, kebijakan, serta pertahanan dan keamanan.
2. Berdasarkan hasil analisis terkait dengan aspek yang menjadi ukuran kesiapan wilayah, ditemukan beberapa variabel yang menentukan kesiapan dalam tiap-tiap aspek. Dari sekian aspek tersebut, terdapat beberapa variabel yang menyatakan belum cukup siap di antaranya variabel kualitas air yang terdapat pada aspek ekologi, spekulasi yang terdapat pada aspek pertanahan, serta ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada aspek demografi. Namun secara komprehensif, wilayah calon lokasi Ibu Kota Negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup mendukung untuk pembangunan Ibu Kota Negara.
3. Dalam rangka menyiapkan lokasi ini untuk menjadi Ibu Kota Negara, maka perlu dirumuskan strategi pengembangan

wilayah Ibu Kota Negara yang didasarkan pada permasalahan yang ada pada wilayah kajian penelitian dan sekitarnya dengan metode yang bersifat kualitatif. Strategi pengembangan wilayah bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan meminimalisir permasalahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut terkait dengan kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara.

SARAN

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat Ibu Kota Negara dan daerah penyangganya serta pembangunan infrastruktur dasar wilayah yang terdiri dari sistem jaringan transportasi baik darat, air, maupun udara, energi, telekomunikasi, dan air bersih yang ditujukan menunjang tercapainya pembangunan berkelanjutan.
2. Pengendalian ekspansi fisik pertumbuhan wilayah Ibu Kota Negara agar tidak *trigger* deforestasi, alih fungsi lahan ke kegiatan yang mendorong kerusakan dan berpotensi memarjinalkan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan hutan.
3. Pengembangan kawasan perkotaan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk, keserasian hubungan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan yang menjadi daerah penyangganya dan keserasian pertumbuhan di dalam kota itu sendiri serta pembangunan kawasan perdesaan di daerah penyangga melalui pengembangan sumber daya manusia dengan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya kehendak dan swadaya masyarakat melalui peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan untuk produksi, pengelolaan, dan pemasaran

hasil produksi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurumbita, Yuke Nori. 2015. Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Bappenas. 2019. Pemindahan Ibu Kota Negara. Disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dalam Dialog Nasional I: Pemindahan Ibu Kota Negara (16 Mei 2019).
- Bappenas. 2019. *Kajian Awal Aspek Sosial IKN*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Chaniago, dkk. 2008. *Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan*. Jakarta: Tim Visi Indonesia 2033.
- Muta'ali, Luthfi dan Sahamony, Anugerah. 2019. *Pemindahan Ibu Kota Tinjauan Geografis*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) UGM.
- Sahamony, Anugerah A. 2018. *Tinjauan Geografis Wilayah Potensial Ibu Kota Negara Indonesia*. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.